

## 1. PERS BEBAS ATAU KEBEBASAN PERS?

Dalam melihat keberadaan media massa dapat dibedakan berdasarkan fungsinya, yaitu yang memiliki fungsi sosial dan fungsi psikologis. Masing-masing fungsi ini lahir dari orientasi isinya yang dapat dibedakan atas 2 tipe yaitu media jurnalisme dan media hiburan. Media jurnalisme dikenali dari orientasinya yang mengutamakan penyampaian informasi bersifat faktual yaitu yang berasal dari realitas sosial. Informasi semacam ini berfungsi untuk membawa khalayak ke dunia sosial. Sedang media hiburan adalah yang mengutamakan penyampaian informasi fiksional. Informasi jenis ini berasal dari alam pikiran dan kreativitas seni, berfungsi untuk membawa khalayak ke dunia psikologis.

Kedudukan media jurnalisme atau yang biasa pula disebut sebagai media pers. menjadi kajian yang penting karena titik singgungnya yang kritis dengan kekuasaan negara. Media massa semacam ini, dapat berupa media cetak atau elektronik (broadcasting) dipandang memiliki fungsi strategis sehingga sering menjadi sasaran dari kekuasaan negara yang eksekutif. Selain itu, keberadaannya dapat menjadi indikator bagi kehidupan masyarakat dan negara, sejauh mana berdasar pada kebenaran dari realitas sosial. Dengan demikian diasumsikan adanya interaksi negara, masyarakat, realitas sosial. Interaksi segitiga ini mewujudkan melalui peran media jurnalisme.

Keberadaan media massa jurnalisme dapat dilihat melalui dua tingkat pendekatan, yaitu pertama secara kultural, dan kedua secara struktural. Keberadaan media jurnalisme secara kultural dilihat pada permasalahan mikro yaitu tindakan profesional yang dijalankan oleh pelaku profesi (jurnalis). Tindakan profesional ini bertolak dari sumber moral yang mendasari profesi jurnalisme. Dengan kata lain, profesi jurnalisme digerakkan oleh nilai moral tertentu melalui tindakan profesional seorang jurnalis. Nilai moral ini selamanya terdiri atas 2 hal, bersifat formal dan empiris. Secara formal, nilai moral ini dirumuskan dalam kode etik (*canons of journalism*), yaitu aturan-aturan (*canon*) untuk standar tindakan profesional secara ideal. Tindakan profesional yang diwujudkan atas dasar nilai moral, akan menghadirkan media jurnalisme sesuai dengan idealisme para pelaku profesi jurnalisme. Kehadiran media jurnalisme dan jurnalis dilihat dari nilai moral baik formal dalam kode etik, maupun empiris dalam praktek tindakan profesional. Dari sinilah dilihat bahwa tindakan profesional yang digerakkan dengan moral profesi merupakan tindakan kultural.

Masalah etika profesi jurnalisme sering dibicarakan secara normatif (Christian, Rotzoll dan Fackler, 1991) Memang betul, setiap ranah etika mengandung sifat normatif. Tetapi ada hal lain yang perlu dilihat, yaitu paradigma yang mendasari keberadaan suatu profesi. Umumnya kalangan jurnalis menganggap keberadaan profesinya bertolak dari suatu hak yaitu hak untuk mencari fakta sosial dan menyebarkan informasi. Hak ini seolah bersifat otonom dan transenden, merupakan dasar keberadaan profesi ini. Anggapan ini telah membangun suatu kebanggaan atas keberadaan profesi jurnalisme. Tetapi kebanggaan ini sesungguhnya semu, karena bertolak dari anggapan yang tidak berdasar.

Jika jurnalis menganggap hak ini memang dipunyainya, perlu dipertanyakan, darimana diperoleh hak tersebut? Dari sini perlu dilihat sisi lain yang mungkin telah terlalaikan selama ini, manakala kita bicara soal landasan moral dari profesi ini.

Suatu profesi ada yang bersifat otonom dan transendental, sebaliknya ada yang bersifat imperatif sosial. Adapun profesi bersifat otonom dan transendental, tidak terkait dengan faktor di luar dirinya. Profesi kedokteran misalnya, bertolak dari paradigma semacam ini. Keberadaannya tidak ditentukan oleh faktor eksternal, termasuk juga pasiennya. Keberadaan profesi ini bertolak dari penghargaan terhadap kehidupan manusia. Dengan kata lain, seluruh ranah profesi kedokteran, mencakup teknik maupun etik, bertolak dari paradigma untuk menghayati kehidupan.

Begitu pula kerja kependetaan atau ulama, dapat disebut sebagai profesi yang bersifat otonom dan transenden. Fungsi misionaris dari pendeta adalah berasal dari sifat otonomi dan transenden dari kerjanya. Seorang pastor tidak akan mengatakan bahwa tindakan profesionalnya adalah untuk memenuhi kepentingan manusia yang dilayaninya, melainkan untuk Tuhan.

Sedangkan profesi jurnalisisme sama sekali tidak bersifat otonom dan transenden. Profesi jurnalisisme, terkait dengan hak pihak lain. Dengan kata lain, keberadaan profesi jurnalisisme pada dasarnya bertolak dari kepentingan pihak lain. Inilah yang menjadi paradigma dari profesi jurnalisisme. Karenanya tindakan profesional seorang jurnalisisme sesungguhnya menjalankan fungsi imperatif yang berasal dari hak dan kepentingan pihak lain.

Apa dan bagaimanapun sifat suatu profesi, dapat terjerumus ke dalam penyalah-gunaan kekuasaan (Johnson, 1972) Masalah yang dihadapi dalam sifat imperatif profesi jurnalisisme adalah kemung-kinan terjebak dalam kekuasaan yang bersumber dari pihak lain yang melingkupinya. Ini perlu dibicarakan lebih tajam dalam masalah kebebasan pers. Kebebasan secara mendasar perlu dilihat dari sifat independensi, sehingga sering disebut sebagai “kebebasan dari”, untuk dibedakan dari “kebebasan untuk”.

Karenanya perlu dilihat siapa dan bagaimana kepentingan pihak lain yang menentukan keberadaan profesi jurnalisisme? Ini pertanyaan krusial, karena kerancuan konsep menjawab pertanyaan ini dapat menjerumuskan wartawan ke dalam pertimbangan pragmatis dalam menjalankan fungsi imperatif ini. Pragmatisme politis mengacu kepada kepentingan penguasa negara, sedangkan pragmatisme ekonomi akan merujuk kepada kepentingan kekuatan modal baik dunia industri maupun perusahaan media. Etika sebagai landasan moral tentunya tidak akan berurusan dengan kerangka kepentingan pragmatisme semacam itu. Sebab orientasi etika selamanya bersifat sosial dan berkonteks kepada cita-cita luhur peradaban.

Perjalanan dalam sejarah profesi jurnalisisme menunjukkan bahwa orientasi kerja jurnalisisme berkembang dari yang sifatnya pragmatis, sampai kemudian kepada landasan moral yang semakin filosofis. Dimulai dari *acta diurna* pada masa Julius Caesar yang dikeluarkan untuk kepentingan para elit politik Romawi, atau lembaran berita yang dikeluarkan oleh dan untuk para pedagang Eropa di abad 17, merupakan bentuk-bentuk produk jurnalisisme yang memiliki sifat pragmatis yang melekat pada fungsi imperatifnya (Hohenberg, 1973). *Acta diurna* diabdikan untuk kepentingan penguasa politik di Romawi, sedang lembaran berita untuk pedagang Eropa yang punya kepentingan perdagangan antar kerajaan atau benua.

Dengan genesis semacam ini profesi jurnalisisme diperkembangkan, dengan landasan filosofisnya, sampai akhirnya para jurnalis memiliki orientasi yang bertolak dari sifat profesinya yang independen. Dengan begitu jurnalis tidak lagi hanya semacam hamba sahaya yang mengabdikan kepada tuannya dalam mencatat isi *acta diurna*, begitu pula bukan hanya sekadar jurutulis pedagang kaya di Eropa.

Lewat sejarah peradaban dunia dapat dibedakan secara tajam profesi jurnalisisme dengan profesi kedokteran. Profesi kedokteran sejak diperkenalkan secara akademik oleh Hippokrates dari era Yunani kuno, tidak mengalami perubahan yang substansial. Sejak awalnya profesi ini sudah bertolak dari paradigma yang sama hingga di masa modern ini. Kalaupun ada perubahan agaknya hanya melalui pendefinisian kapan dimulai dan berakhirnya kehidupan sebagai akibat perkembangan teknologi. Sedang penghargaan yang absolut terhadap kehidupan, tetap adanya.

Profesi jurnalisisme bermula dari budak para bangsawan yang memiliki keterampilan membaca dan menulis, karenanya ditugasi oleh tuannya berlari ke gedung senat untuk menyalin keputusan-keputusan dalam rapat senat yang dicatat sebagai *acta diurna*.

Begitulah setiap kali menyebut jurnalis dan jurnalisme, mau tidak mau kita diingatkan dengan leluhurnya di Romawi kuno sana.

Baru setelah Joseph Pulitzer juragan surat kabar World menghibahkan dana untuk Universitas Columbia pada awal abad 20 ini, jurnalisme mulai dikembangkan pada tingkat universitas. Dengan begitu profesi jurnalisme mulai bertegak sama halnya dengan profesi lainnya yang telah lebih dulu diasuh secara akademik.

Demikianlah, secara kiasan sering disebutkan, pers boleh dipandang sebagai matahari. Mungkin ada yang menyebutnya sebagai "racun dunia". Tetapi dapat pula dilihat sebagai suatu cermin. Anggapan-anggapan ini bermula dari pengaruh dan fungsi pers dalam masyarakat. Mereka yang melihatnya sebagai matahari, mungkin karena merasakan betapa pers menerangi dunia. Pers menyibak kegelapan, sehingga manusia dapat mengetahui alam dan manusia lainnya. Sebaliknya tuduhan sebagai racun dunia tak lain akibat informasi yang disajikannya, bagaikan bujukan setan kepada manusia untuk berbuat kejahatan.

Kedua pandangan ini bertolak dari sikap etis, yaitu tuntutan moral terhadap apa yang harus dilakukan oleh pers. Sebagai matahari yang menerangi kegelapan dalam kehidupan manusia, maka muatan pers diharapkan dapat mengubah manusia menjadi lebih baik. Begitu pula setiap muatan yang dapat meracuni kehidupan manusia, hendaknya dihindari. Tuntutan-tuntutan atas dasar moralitas menunjukkan bahwa pers dianggap penting dalam kehidupan, sama pentingnya dengan lembaga-lembaga lainnya semacam negara, ekonomi, dan agama.

Selain pandangan etis, dapat pula digunakan perspektif sosiologis. Pers sebenarnya lahir dari masyarakat dengan fungsinya yang khas sebagai lembaga masyarakat (McQuail, 1987). Pada fungsi utama yang dijalankan melalui pekerjaan para jurnalis adalah mencatat setiap realitas yang berlangsung dalam masyarakat, untuk kemudian menyampaikan catatan ini kembali kepada masyarakat. Penulisan "diurna" ini bertolak dari suatu "kontrak sosial" yang menandai paradigma keberadaannya. Lebih jauh paradigma ini akan menandai apakah pers itu sebagai lembaga masyarakat, ataukah hanya sebagai perpanjangan lembaga-lembaga lainnya yang ada dalam masyarakat. Pers dapat menjadi perpanjangan dari lembaga negara, ekonomi dan agama. Dengan demikian pers sudah menjadi sarana propaganda bagi lembaga-lembaga tersebut, bukan sebagai lembaga kemasyarakatan dengan fungsinya yang khas.

Pers mungkin saja menjadi sarana propaganda. Tetapi untuk itu harus jelas kontrak sosial yang mendasari keberadaannya. Ini akan membawa implikasi terhadap hubungan pers dengan masyarakat khalayaknya di satu pihak, dan pers dengan lembaga induknya pada pihak lain. Sebagai sarana propaganda bukan fungsi sosiologis yang menjadi dataran berpijak bagi pers, melainkan fungsi ideologis. Pilihan antara perspektif sosiologis dengan ideologis ini dengan sendirinya akan membawa konsekuensi bagi kehidupan materil media pers. Dengan perspektif sosiologis, kehidupan materil dari pers akan didukung oleh masyarakat khalayaknya. Sementara pilihan ideologis tidak akan menuntut dukungan materil dari khalayaknya.

Di Indonesia, kecuali media pemerintah, media pers langsung atau tidak langsung dihidupi oleh masyarakat khalayaknya. Dengan demikian secara empiris, keberadaan pers adalah sebagai lembaga kemasyarakatan yang memiliki ciri sosiologis. Permasalahan etis dalam perspektif sosiologis ini adalah menjaga agar pers tidak distir oleh kepentingan lembaga-lembaga negara, ekonomi atau agama. Kepentingan lembaga ekonomi misalnya, secara tajam harus dapat dikenali agar dibedakan dengan realitas sosiologisnya masyarakat. Itulah sebabnya antara iklan komersial dan berita, harus dapat dipisahkan dengan tegas. Iklan jelas-jelas demi kepentingan subyektif lembaga ekonomi. Sementara berita yang berupa realitas sosiologis sepenuhnya berasal dari masyarakat.

Maka satu-satunya yang akan mengendalikan pers adalah realitas yang berlangsung dalam masyarakat. Ini dapat disebut sebagai realitas sosiologis. Mungkin timbul pertanyaan, apakah tidak terkandung kepentingan subyektif dari pelaku dalam suatu realitas sosiologis? Tentu saja hal ini dapat terjadi. Tetapi asumsi dasar yang dijalankan adalah untuk merekonstruksi realitas sosiologis yang bersifat obyektif. Kalaupun terdapat di dalamnya kepentingan subyektif pelaku, dengan sendirinya akan larut dalam sifat obyektifitas dari realitas sosial tersebut.

Seluruh training profesional diharapkan menggunakan asumsi dasar ini. Dengan kata lain, teknik jurnalistik menggunakan asumsi etis tentang keberadaan pers sebagai lembaga sosial, dan sifat obyektif dari realitas sosial. Pemahaman tentang kelayakan suatu berita misalnya, selain bertolak dari motivasi khalayak pembaca, juga dari karakter intrinsik dari suatu realitas yang sepenuhnya bersifat sosiologis. Dengan begitu teknik dan etik jurnalisme ditujukan untuk menghadirkan pers sebagai lembaga kemasyarakatan.

Etika jurnalisme formal di Indonesia, yang diwujudkan melalui kode etik jurnalistik setiap organisasi profesi jurnalis, diharapkan mengandung orientasi untuk landasan menghadirkan dan memelihara pers dengan sifat kelembagaan masyarakatnya. Tetapi hal-hal yang diatur seperti pemilahan berita dan opini misalnya, sering diartikan secara lugas, sehingga membingungkan. Bagaimana menilai berita tentang seseorang yang berpendapat? Jika yang dimaksudkan adalah perbedaan berita dengan artikel opini, atau opini dari seorang jurnalis yang termuat dalam berita yang ditulisnya, tentu hal ini harus diperhatikan setiap jurnalis. Tetapi dalam perkembangan teknik penyajian berita, dengan makin beragam dan kompleksnya permasalahan yang dilaporkan melalui pers, subyektifitas dan opini jurnalis sebagai dasar interpretasi bahkan mungkin diperlukan. Tetapi perlu dinilai secara kritis, apakah subyektifitas dan opini ini dalam kerangka orientasi etis untuk sifat kelembagaan masyarakat, ataukah hanya untuk kepentingan subyektif pengelola pers.

Karenanya landasan etis yang lebih penting bagi jurnalis adalah yang memberikan orientasi bagi keberadaan pers sebagai lembaga kemasyarakatan. Tentu saja orientasi ini diwujudkan melalui tindakan profesional para jurnalis dari berbagai media pers. Tetapi tidak hanya mengatur keberadaan jurnalis dalam pekerjaan teknisnya.

Kode etik formal jurnalis di Indonesia lebih menitik beratkan kepada perilaku individual para pelaku profesi. Ini penting, tetapi yang tak kalah urgennya adalah pengaturan yang "memaksa" jurnalis untuk membersihkan catatannya agar tidak dikotori oleh kepentingan yang bertolak dari kekuasaan semacam negara, ekonomi dan agama. Seluruh kekuasaan ini, sudah barang tentu diperlukan oleh masyarakat, tetapi tidak identik dengan realitas sosiologisnya masyarakat. Domain kekuasaan terpisah dari domain realitas sosiologis masyarakat. Masyarakat dapat berurusan dengan kekuasaan, dan ini menjadi realitas sosiologis. Tetapi domain kekuasaan sendiri, tidaklah menjadi realitas sosial.

Bagaimana menghargai realitas sosiologis sepenuhnya sebagai domainnya masyarakat, membawa konsekuensi bagi jurnalis untuk peka terhadap "realitas sosiologis" yang sudah diformat oleh kekuasaan dari luar masyarakat. Dengan kata lain, jurnalis dapat membedakan antara realitas sosiologis yang murni dengan "realitas sosiologis" sebagai hasil rekayasa, sebagaimana membedakan kehidupan empiris dengan "kehidupan" yang dipanggungkan di gedung teater.

Orientasi etis ini semakin dirasakan pentingnya di tengah masyarakat yang semi tertutup. Realitas masyarakat yang dapat ditampilkan sebagai berita, adakalanya harus dipilih atas dasar kriteria yang ditetapkan oleh kekuasaan di luar pers. Karenanya penghargaan dan kesetiaan akan realitas sosiologis ini menjadi pangkal bagi keberadaan pers sebagai lembaga kemasyarakatan. Tetapi bukan berarti tidak membawa eksese. Potret realitas sosiologis yang tajam, bukan mustahil hanya menjadi penyajian keganasan, kekorangan dan

barbarisme anggota masyarakat. Dalih sebagai cermin masyarakat mungkin saja sebenarnya untuk menutupi orientasi komersial dan formula pasar.

Jika pers ditempatkan sebagai cermin yang merefleksikan realitas sosiologis, tidak dapat dipandang sepenuhnya mempengaruhi masyarakat. Pertanyaannya bukanlah sejauh mana pers mempengaruhi masyarakat, melainkan sejauh mana realitas sosial yang kembali ke masyarakat itu mempengaruhinya? Tidak dapat diabaikan bahwa seluruh realitas tersebut dibuat oleh masyarakat. Jurnalis hanya membuat berita, masyarakat membuat realitas. Kemampuan teknik dan orientasi etis seorang jurnalis dilihat sejauh mana identiknya berita dengan realitas yang ada dalam masyarakat.

Mungkin saja ada pandangan bahwa pers memiliki kecenderungan mikroskopis maupun amplifair dalam menyampaikan realitas. Dengan kecenderungan ini memang sifat identik berita dan realitas perlu dipertanyakan. Informasi yang berasal dari mikroskop dan amplifair memiliki perbedaan dengan realitas yang menjadi bahan bakunya.

Sebuah koran terbitan ibukota dengan lay-out sirkus dan jejalan kepala berita pada halaman muka, setiap hari mengantarkan realitas sosial yang berlangsung di pelosok metropolitan. Berita-berita yang disampaikan menggambarkan tindakan-tindakan fisik penyimpangan sosial. Bagian terbesar berupa tindakan destruktif baik terhadap orang lain (perampokan, pemaksaan seksual) maupun terhadap diri sendiri (bunuh diri).

Menghadapi koran ini bisa saja muncul pemikiran, mungkinkah berita-berita ini akan mempengaruhi masyarakat? Setiap hari dijejali dengan realitas tentang penyimpangan sosial, orang akan terkonndisi untuk menerima peristiwa-peristiwa itu. Dengan kata lain, pers dianggap sebagai acuan dalam bertindak. Dampak peniruan dapat terjadi.

Perampasan dan pemaksaan hak pihak lain, destruksi kepada diri sendiri, disatu pihak terpajang dalam pers. Namun pada pihak lain tak boleh dilupakan, muatan pers ini hanya akan ada, jika memang ada realitas dalam masyarakat. Masalahnya, dengan dominasi berita penyimpangan sosial ini, dominan pulakah realitas penyimpangan sosial di metropolitan? Bertolak dari kaidah jurnalisme yang standar, maka dapat diasumsi bahwa agenda masyarakat identik dengan agenda pers. Jika asumsi ini teruji secara empiris, dengan menonton koran ibukota ini, dapat disimpulkan bahwa masyarakat metropolitan dapat disebut sebagai masyarakat patologis. Artinya, jika tindakan penyimpangan sosial sudah dominan dalam suatu masyarakat, tak pelak lagi masyarakat itu sakit adanya.

Muatan pers dapat dijadikan indikator sosial. Tetapi untuk itu masih perlu dilihat lebih jauh, apakah pers yang ada itu benar-benar sebagai lembaga kemasyarakatan? Dapat saja terjadi, bahwa pers menjadikan penyimpangan sosial sebagai menu utama, bukan karena realitas semacam itu dominan dalam masyarakat. Artinya pers tidak identik dengan realitas masyarakat. Muatan dalam pers hanyalah agenda yang lahir dari politik jurnalisme pengelola pers semata. Dalam posisinya sebagai gate-keeper, jurnalis koran itu telah sewenang-wenang dalam menghadapi realitas, karena hanya memilih realitas yang sesuai dengan formula pasar. Koran semacam ini sebenarnya telah mereduksi masyarakat dalam bentuk kepingan-kepingan penyimpangan sosial dari segelintir warga masyarakat. Kalau ini yang terjadi, yang perlu digugat adalah formula jurnalisme yang dianut oleh para jurnalisnya. Pers ini tidak menjadi cermin masyarakat, tetapi dengan menggunakan teknik jurnalisme menjalankan formula produk yang semata-mata berorientasi kepada pasar (Lazarfeld dan Merton, 1957).

Memang tidak terelakkan prinsip pasar yang harus dijalankan oleh pengelola pers. Pers harus dipasarkan, dan melalui oplah terjual, keberadaan media pers dinilai oleh pemasang iklan. Dan melalui iklan antara lain otonomi dan kemandirian politik dapat ditegakkan. Dengan kata lain, pemasukan iklan dapat menjadi faktor untuk membuat pers tidak perlu menggantungkan diri pada subsidi materil dari kekuasaan di luar dirinya. Hubungan

pemasang iklan dan media pers bersifat simbiosis, berbeda halnya jika berupa bantuan materil yang menyebabkan pers subsidiari kepada kekuasaan pemberi subsidi.

Ciri pers sebagai lembaga kemasyarakatan dilihat dari otonomi dan kemandirian ini. Hanya perlu disadari bahwa keberadaan dalam konteks ekonomi ini tidak menjadi jaminan lahirnya lembaga kemasyarakatan. Bukan mustahil seluruh keberadaan suatu media pers sebenarnya berpijak pada dataran formula pasar. Niat pengelolanya sama saja dengan dorongan yang ada dalam dunia ekonomi umumnya, yaitu menjual dan profit. Untuk tujuan ini formula pasar yang dijalankan sederhana saja. Memilih realitas yang tidak bersinggungan dengan kekuasaan. Realitas penyimpangan sosial yang berlangsung pada akar rumput (grass root) dengan sendirinya mudah dieksploitasi. Pada satu pihak dapat memenuhi motivasi massa, pada pihak lain tidak membawa risiko. Beda halnya jika menyangkut penyimpangan sosial kelompok menengah dan atas, sangat besar kemungkinan bersinggungan dengan kekuasaan.

Formula pasar ini gampang dideteksi. Selain mengeksploitasi penyimpangan sosial kelompok bawah, juga menggunakan cara mikroskopis dan amplifair. Cara mikroskopis adalah dengan memberikan detail dari tindakan-tindakan menyimpang, sedang amplifair adalah dengan meneriakkan setiap detail yang dipandang dapat menggugah sensasi.

Pers formula pasar, dengan cara mikroskopis dan amplifair ini memiliki posisi yang khas, keberadaannya lebih banyak untuk fungsi psikologis khalayaknya. Mungkinkah akan berdampak kepada pembacanya? Jika sejak awal berita-berita semacam ini berfungsi sebagai pelampias, maka hanya berfungsi katarsis. Untuk mengimitasi detail penyimpangan sosial yang diperoleh dari pers, tentulah diperlukan motivasi yang lebih spesifik.

Motivasi membaca pers pada tataran pemuasan psikologis akan berbeda dengan motivasi untuk menjadikan pers sebagai acuan sosial. Sementara acuan untuk tindakan penyimpangan sosial tidak hanya dari pers. Dan yang paling utama adalah faktor-faktor yang mendorong untuk tindakan penyimpangan sosial itu. Menyimpulkan penyimpangan sosial disebabkan oleh rangsang yang berasal dari pers, bertolak dari pandangan yang psikologi-mekanistik. Manusia tidak sesederhana yang dibayangkan dengan stimulus dan respon, sebab kualitas hubungan-hubungan sosial yang dijalannya harus dilihat pula ikut menjadi pendorong bagi tindakan sosial.

Karenanya muatan pers berupa eksploitasi penyimpangan sosial, bukanlah berarti cermin masyarakat. Tetapi pers dengan formula khas semacam ini diperlukan oleh masyarakat yang mengalami ketertekanan dalam hubungan-hubungan sosialnya. Cuma akan menjadi keprihatinan jika formula ini dianut beramai-ramai oleh pengelola media pers. Koran dan majalah yang tadinya dicitrakan sebagai lembaga kemasyarakatan ikut-ikutan pula berburu penyimpangan sosial, dengan menggunakan cara mikroskopis dan amplifair. Dalam menghadapi kasus artis Ria Irawan yang pernah mendominasi halaman koran, misalnya, hampir tak bisa dibedakan cara penyajian antara pers yang berorientasi sebagai lembaga kemasyarakatan dengan pers yang semata-mata berorientasi formula pasar. Realitas artis Ria Irawan ini seolah sedemikian pentingnya sehingga “dimikroskopiskan” dan “diamplifairkan”.

Citra setiap media pers di tengah masyarakat akan berbeda. Dengan begitu fungsinya bagi masyarakat tidak akan sama pula. Ini bermula dari perbedaan orientasi etis. Soal pilihan orientasi ini adalah hak dari masing-masing pengelola. Bagi sementara pengelola keberadaan pers sama halnya komoditi perdagangan lainnya. Bagi yang lain, keberadaan pers tidak semata-mata dalam konteks ekonomi. Lebih jauh perlu dilihat sejauh mana otonomi dan kemandirian ini digunakan untuk menjalankan fungsi kemasyarakatannya. Menjadi cermin masyarakat adalah dengan merefleksikan segala realitas masyarakat dengan tujuan yang jelas, bagi kemaslahatan kehidupan manusia.

Media massa biasa pula dilihat sebagai cermin kehidupan masyarakat. Setiap realitas dalam masyarakat dapat menjadi informasi media massa. Karenanya media massa dapat dijadikan indeks dari kehidupan sosial. Dengan kata lain, informasi media massa adalah bayangan dari realitas sosial.

Sebagaimana menghadapi suatu cermin, setiap pihak selalu mengharapkan bayangan “wajahnya” terlihat bagus di cermin. Cermin yang menggambarkan bayangan lebih bagus dari realitas, tentulah sebuah cermin yang cacat. Sama halnya cermin yang memberikan bayangan yang lebih buruk dari realitasnya, juga adalah cermin yang cacat.

Isi media massa dalam kelompok besar berupa informasi faktual yang bersumber dari realitas sosial, dan informasi fiksional yang berasal dari alam pikiran personal. Sebagai institusi sosial, media massa dilihat dari peran utamanya sebagai penyampai informasi faktual. Jika masyarakat lebih mengharapkan media massa sebagai sumber informasi fiksional, tidak dapat disebut sebagai institusi sosial.

Komunikasi massa, kegiatan penggunaan media massa, berlangsung untuk alam pikiran. Informasi yang disampaikan melalui media massa, pada dasarnya untuk mengisi dunia alam pikiran khalayaknya. Dari sini fungsi media massa dapat dibedakan melalui dua tipologi, pertama difungsikan untuk mengubah alam pikiran khalayak, dan kedua untuk memenuhi motivasi khalayak. Secara sederhana media massa tipe pertama dilihat nilai gunanya bagi komunikator, sedang yang tipe kedua bernilai guna bagi komunikan.

Pada sisi lain, orientasi media massa dapat dilihat dari pengutamaan muatan informasi yang disampaikan kepada khalayak. Untuk itu dapat dibedakan antara media massa yang berorientasi informasional dengan orientasi hiburan. Orientasi pertama membawa khalayak ke dunia sosial bersifat obyektif dan empiris, sementara yang kedua membawa ke dunia psikologis bersifat subyektif dan imajinatif.

Dari perbedaan orientasinya inilah pilihan informasi dijalankan. Media massa berorientasi informasional akan mengutamakan materi informasi bersifat faktual, sedang yang berorientasi hiburan menitik-beratkan pada materi informasi bersifat fiksional. Media massa semacam surat kabar harian misalnya, berorientasi informasional, sehingga mengutamakan materi faktual. Berbeda halnya dengan media siaran televisi (tv-broadcasting) yang berorientasi hiburan, dengan mengutamakan materi fiksional.

Kecenderungan dominan orientasi media yang berkaitan dengan sifat materi informasi menyebabkan antara media dan khalayak terdapat platform hubungan, merupakan konvensi yang bersifat resiprokal (bertimbang-balik). Artinya hubungan berdasarkan kesepakatan bahwa pengelola media "menjanjikan" tipe media dan informasi tertentu sesuai dengan "tuntutan" khalayaknya. Karenanya suatu media yang tidak bertolak dari "tuntutan" khalayak seperti halnya media yang difungsikan untuk mengubah khalayak, harus dihadirkan tidak dalam platform resiprokal, melainkan bersifat top-down dan linier. Ini berlaku untuk media massa untuk dakwah agama, pendidikan, atau perjuangan ideologis.

Bertolak dari fungsi dan orientasi media massa ini maka keberadaan media massa tidak dapat disama-ratakan satu sama lain, mengingat perbedaan pilihan informasi yang disajikan, dan harapan (expectation) khalayak. Seperti halnya dengan nilai kebangsaan, untuk dikaitkan dengan media massa dengan sendirinya membawa konsekuensi berbeda. Media yang berfungsi untuk mengubah khalayak, akan berbeda dari yang berfungsi memenuhi motivasi khalayak. Begitu pula media yang berorientasi informasional akan berlainan perannya dari media yang berorientasi menghibur.

Seluruh dasar pemikiran ini bermuara kepada dua perspektif konseptual. Pertama, melihat media massa dengan perspektif normatif, yaitu peran imperatif media massa atas dasar norma-norma ideologis, dapat berupa ideologi negara, ekonomi, atau budaya. Sedang

kedua, perspektif sosiologis, yang membawa konsekuensi dalam peran imperatif media berdasarkan interaksi tuntutan dan pemenuhan. Tuntutan agar media massa mendidik masyarakat, kendati mengatas-namakan masyarakat, tidak dapat dianggap sebagai perspektif sosiologis manakala tidak bertolak dari motivasi otentik dari khalayak.

Informasi yang berasal dari realitas sosial dapat dipilah sesuai dengan dinamika masyarakat, yaitu politik, ekonomi, hukum, dan budaya. Dari sini media massa dapat dijadikan sumber data dalam mengenali realitas. Tetapi perlu dipahami bahwa yang dicerminkan oleh media massa mencakup lingkup yang luas, tidak terbatas hanya tentang komunitas tertentu. Lingkup lokal, nasional dan global suatu realitas, sebagai sifat informasi faktual dalam media massa.

Dengan demikian dalam menghadapi media massa pada dasarnya perlu didukung oleh budaya media, yaitu konvensi yang dikenali oleh khalayak dalam mengambil kemanfaatan muatan media massa. Tidak setiap informasi media massa memiliki nilai guna bagi khalayaknya. Ciri dari media massa adalah dalam mengemas informasi yang bersifat massal, karenanya tidak untuk kepentingan spesifik konsumen. Untuk itu diperlukan tingkat budaya media tertentu untuk dapat memanfaatkan informasi media massa. Misalnya, khalayak mengetahui apa makna suatu informasi berupa berita politik di luar negeri misalnya, atau human interest story semacam berita tentang perceraian bintang film.

Dari sini lebih jauh dapat dilihat bagaimana pembaca menyikapi kehadiran pers. Seorang pembaca mungkin menuntut muluk-muluk. Boleh jadi seseorang berharap agar pers menjadi semacam guru, yang membimbing jalan ke masa depan. Atau bahkan ikut mengubah nasib manusia, mengangkatnya untuk melewati batas kemiskinan.

Tetapi pada pihak lain, mungkin ada yang mengharapkan kehadiran pers dengan orientasi yang berbeda. Itulah sebabnya kita juga membaca koran yang menjadikan peristiwa kriminal sebagai menu utama dalam setiap edisinya. Tidak mungkin kita mau digurui dalam soal-soal kriminal, dan juga kita tahu tak mungkin nasib kita berubah menjadi lebih baik dari acuan benak kita dengan informasi kriminalitas. Kita membaca koran itu dengan motivasi yang berbeda.

Kita membutuhkan pers yang bertujuan untuk memberikan informasi agama, pembangunan atau perjuangan, yaitu yang diorientasikan mendidik masyarakat agar sesuai dengan alam kehidupan ideal. Tetapi kita juga kita memerlukan koran yang merefleksikan tindakan destruktif terhadap pihak lain (perampokan dan pemaksaan seksual), dan pada diri sendiri (bunuh diri). Kedua pers ini berada pada dua titik yang jauh berseberangan. Di satu pihak koran yang bertolak dari dataran ideologis, sementara pada pihak lain yang mengeksploitasi impuls sensasi khalayaknya.

Kedua titik ekstrim ini sebenarnya berada dalam dataran yang berada di luar kehidupan sosial. Jenis yang pertama, koran ideologis semacam ini tidak mungkin hidup tanpa mencantelkan diri kepada institusi lain yang menjadi sumber ideologinya. Katakanlah ideologi pembangunan akan mengacu kepada birokrasi pembangunan, karenanya pers yang menjalankan ideologi ini harus menjadi media organik bagi institusi birokrasi. Sebagai media organik, yang menyangga kehidupan pers ini tentulah institusi induknya. Proses yang berlangsung adalah berupa rekayasa untuk mengubah masyarakat, karenanya masyarakat harus memperoleh informasi secara gratis.

Sebaliknya pers jenis kedua, tidak berbuat apapun untuk orientasi kehidupan sosial, kecuali menyentuh impuls psikologis khalayak. Masyarakat membutuhkan media semacam ini menjadi sarana untuk mencapai katarsis dari tekanan kehidupan empiris, atau bahkan menumbuhkan kecemasan (*anxiety*) dalam menghadapi kehidupan sosial (Wright, 1986)



Dalam konteks ideologi pembangunan, koran yang menjual komoditi berupa stimulus sensasi sebagai menu utamanya, tidak mendapat tempat. Sebaliknya, koran ideologis yang keberadaannya datang dari atas, tidak dapat dijual sebagai komoditi. Karenanya pilihan satu di antara dua titik ekstrim ini tidak pernah dilakukan dengan menggunakan ukuran yang berasal dari titik lainnya. Semata-mata sebagai alat pendidikan massa, atau hanya sebagai komoditi ekonomi, keduanya sebenarnya sudah keluar dari kodrat pers yang hakiki, yaitu sebagai institusi masyarakat.

Untuk memilih satu di antara titik ekstrim itu merupakan jalan yang paling aman. Misalnya menjadi perpanjangan bagi kebijakan birokrasi pembangunan. Pers jenis ini tidak akan terganggu adanya regulasi yang menghalanginya untuk merefleksikan fakta-fakta sosial, sebab orientasinya adalah untuk menyampaikan informasi bersifat “top-down”. Sementara pers jenis kedua, selama lebih banyak mengeksploitasi fakta-fakta penyimpangan sosial masyarakat bawah, sedikit bersinggungan dengan kekuasaan negara, pasti akan terjamin kehidupannya kendati ada regulasi pemerintah terhadap media pers.

Pers dianggap menjalankan fungsinya jika dapat mengungkapkan fakta sosial. Fungsi institusi pers dalam perspektif sosiologis menyampaikan fakta-fakta sosial, bertolak dari paradigma sistem sosial yang mapan. Dengan kata lain, jika ada pers yang bertujuan untuk melakukan perubahan sistem (pers perjuangan, pembangunan atau dakwah), fungsi ini tidak bersifat sosiologis, tetapi atas dasar pilihan ideologis.

Sebaliknya kita perlu pula waspada dalam menghadapi fakta-fakta atau kenyataan sosial yang mengisi halaman koran. Seperti koran yang menjadikan penyimpangan sosial sebagai menu utama. Masih perlu dilihat lebih jauh, apakah pers yang ada itu benar-benar sebagai institusi sosial? Dapat saja terjadi, bahwa pers menjadikan penyimpangan sosial sebagai menu utama, bukan karena realitas semacam itu dominan dalam masyarakat. Artinya pers tidak identik dengan realitas masyarakat. Muatan dalam pers hanyalah agenda yang lahir dari politik jurnalisme pengelola pers semata. Dalam posisinya sebagai gate-keeper, wartawan koran itu telah sewenang-wenang dalam menghadapi fakta sosial, karena hanya memilih fakta yang sesuai dengan formula pasar. Koran semacam ini sebenarnya telah mereduksi masyarakat dalam bentuk kepingan-kepingan penyimpangan sosial dari segelintir warga masyarakat. Kalau ini yang terjadi, yang perlu digugat adalah formula jurnalisme yang dianut oleh para jurnalisnya. Pers ini tidak menjadi cermin masyarakat, tetapi dengan menggunakan teknik jurnalisme menjalankan formula produk yang semata-mata berorientasi kepada pasar.

Kehidupan sosial tentulah tidak hanya penyimpangan sosial bersifat fisik, terlebih hanya di kalangan bawah. Kaidah jurnalisme berorientasi kepada setiap realitas yang berlangsung, dan tidak hanya yang akan memberikan stimulus bagi sensasi khalayak. Pilihan realitas ini selain ditentukan oleh formula pasar, yang tak kalah pentingnya adalah orientasi etis kaum jurnalis untuk menghadirkan institusi sosial.

Tentu saja menghadirkan suatu institusi sosial tidak hanya ditentukan oleh orientasi etis para jurnalis. Jurnalis hanya dapat menuliskan realitas dalam masyarakat. Jika disebut realitas, tak lain dari proses interaksi otentik yang berlangsung dalam masyarakat, bukan realitas buatan yang diakibatkan oleh rekayasa kekuasaan. Untuk mendapatkan realitas otentik ini diperlukan kapasitas teknik jurnalisme yang standar di satu pihak, dan pada pihak lain memang tersedia realitas yang dapat diangkat sebagai informasi.

Ketersediaan realitas ini biasa disebut secara populer sebagai keterbukaan. Apa makna keterbukaan bagi pers? Yaitu pers tidak dibatasi oleh kekuasaan di luar dirinya dalam mengangkat setiap realitas, sepanjang realitas tersebut ada dalam masyarakat, dan tidak menyimpang dari orientasi etis jurnalisme. Selain itu juga tidak dapat dilupakan, bahwa realitas selamanya berkaitan dengan manusia dan situasinya. Karenanya, hanya adanya

keleluasaan bagi manusia mengungkapkan situasinya (empiris), atau sumber-sumber yang bersedia mengungkapkan realitas yang diketahuinya, adalah sebagai landasan keterbukaan sosial. Jika manusia serba takut untuk mengungkapkan situasinya, atau hanya berani menyampaikan sesuai dengan petunjuk atasan, akibatnya realitas sosial sulit diperoleh oleh pers.

Dengan demikian pemanfaatan alam keterbukaan bagi pers bukan hanya ditentukan oleh keterampilan teknis jurnalisme, tetapi yang paling utama adalah dataran yang dipijak oleh jurnalis dan kekuasaan yang dapat menentukan realitas sebagai informasi pers. Jika pijakan keduanya berada pada dataran yang sama, dapat diharapkan akan hadir pers sebagai institusi sosial. Dalam merefleksikan realitas masyarakat, pers dapat menjalankan fungsinya sepenuhnya. Artinya pers tidak menjadi media propaganda dari atas, sebaliknya juga tidak hanya mengeksploitasi penyimpangan sosial dari kalangan bawah. Keduanya mereduksi fungsi pers sebagai bagian dari kehidupan masyarakat.

Terlepas dari berbagai ekspektasi yang ditujukan kepada media pers, kalau dikembalikan pada hakekatnya, fungsi media pers yang sejati adalah menyampaikan fakta-fakta sosial dalam wujud informasi kepada khalayaknya. Setidaknya orientasi semacam ini menjadikan media pers sebagai "zona bebas", yang menjadi forum yang menampung fakta-fakta sosial melalui wacana yang berkembang dalam masyarakat, sehingga dapat diuji secara bebas dengan nalar obyektif.

Berita yang dimuat dalam media pers mencerminkan realitas dalam masyarakat. Sering disebutkan, jurnalisme yang ideal adalah yang dapat membuat wacana (discourse) berita media identik dengan realitas sosial. Dengan kata lain, membaca media pers sama halnya membaca masyarakat. Dalam fungsinya yang hakiki, pers sebagai institusi sosial ditunjukkan melalui kehadirannya sebagai cermin masyarakat. Kalau ada fungsi lainnya, seperti pendidikan, persuasi atau agen pengubah masyarakat, sudah merupakan fungsi subsider. Hakekat etik jurnalistik yang umum adalah untuk menghadirkan cermin masyarakat. Tetapi tidak dapat disimpulkan bahwa setiap media pers otomatis adalah cerminan masyarakat, mengingat adanya faktor lain yang ikut menentukan muatan pers.

Orientasi berdasarkan etika untuk menghadirkan institusi sosial, dapat tarik-menarik dengan orientasi formula pasar yang berasal dari kekuasaan manajemen intern perusahaan pers di satu pihak, dan tekanan yang berasal dari kekuasaan ekstern. Kekuasaan ekstern ini dapat berupa politik dan ekonomi. Resultante dari tarik-menarik ini melahirkan media pers yang kita kenal dalam masyarakat. Dengan kata lain, motivasi individual dari pekerja akan berhadapan dengan vektor-vektor kekuasaan sistem manajemen internal tempatnya bekerja dan kekuasaan ekstern yang berasal dari berbagai sub-sistem politik dan ekonomi.

Masalah etika jurnalistik secara makro dapat dilihat dalam konteks tarik-menarik vektor ini. Pertanyaan yang perlu dijawab adalah sejauh mana media pers dapat menjalankan fungsinya sebagai institusi sosial. Perhatian terhadap faktor kekuasaan intern dan ekstern perlu dilakukan untuk menilai apakah suatu media pers dapat menjadi institusi sosial, ataukah hanya menjadi sarana dalam mewujudkan formula pasar bagi modal perusahaan media, atau menjadi ekstensi dari lembaga-lembaga lain seperti birokrasi pemerintahan atau dunia industri.

Publik membaca media pers/jurnalisme karena yakin bahwa dia akan mengungkapkan realitas sosial yang bersifat faktual. Kalau seseorang ingin membaca doa misalnya, dia akan beli buku kecil cetakan ayat-ayat Qur'an, tidak mencarinya di surat kabar. Begitu juga kalau suka menampung propaganda, dia akan mencari media yang lain.

Doa dan propaganda bukan realitas sosial. Kalau sekelompok orang mendoakan pejabat negara, memang merupakan realitas sosial. Tetapi nilai informasinya bukan dari doa itu,

melainkan dari posisi manusia dan situasinya dalam konteks kehidupan sosial itulah sebagai realitas yang bernilai bagi pers.

Keberadaan pers sangat tergantung pada tersedianya materi realitas sosial. Kita pernah mengenal surat kabar yang menjadi ekstensi dari partai politik. Keberadaannya tidak ditentukan oleh hubungannya dengan khalayaknya, tetapi dari loyalitas khalayak tadi kepada partainya. Partai-partai di masa itu ada yang mengklaim jumlah anggota sampai jutaan, tetapi oplah surat kabarnya sama sekali tidak ada melebihi surat kabar utama yang kita kenal sekarang. Ini dapat dijadikan petunjuk, bahwa motivasi terhadap media pers tidak dapat bertolak dari kepentingan lain, termasuk ideologi. Motivasi terhadap media pers adalah untuk mendapatkan informasi faktual, bukan untuk memenuhi kepuasan ideologi.

Karenanya perkembangan media pers perlu dilihat dari peluangnya dalam menyampaikan realitas sosial. Sebutan yang populer adalah keterbukaan. Apakah sesungguhnya keterbukaan itu? Ketika realitas sosial dibiarkan apa adanya, dan wartawan boleh memungut dan menjadikannya informasi. Ketika tidak ada kekuasaan yang merasa perlu merencanakan realitas sosial sehingga bukan hanya "realitas" bentukan yang boleh dijadikan informasi. Ketika warga masyarakat tidak merasa terhalang untuk menyampaikan pendapatnya tentang realitas sosial sehingga pendapatnya dapat dikutip oleh wartawan. Itulah keterbukaan.

Ada yang mengganjal rasanya, ketika muncul penilaian tentang keberanian pers dalam menyampaikan informasi. Sebutan yang aneh. Apakah diperlukan keberanian yang spesifik untuk menjalankan fungsi pers? Seolah "keberanian" menjadi formula yang dapat digunakan dalam menyampaikan informasi. Formula semacam ini sebenarnya sudah dikenal dalam wajah lain, yaitu sensasionalisme. Kebetulan formula klasik ini umumnya diterapkan untuk realitas yang berkaitan dengan penyimpangan sosial bersifat fisik (kriminalitas). Menjadi berbeda jika diterapkan untuk realitas berkonteks sosial, seperti politik dan ekonomi.

Begitulah, masalahnya adalah lautan realitas, baik telanjang (overt) maupun tersembunyi (covert) yang harus dikorek dengan teknik jurnalistik. Realitas telanjang yang bersifat fisik mudah untuk dijadikan informasi. Tindakan destruktif kepada pihak lain seperti perampasan, pemaksaan seksual, atau terhadap diri sendiri (bunuh diri), mudah ditemukan dalam kolom surat kabar. Tetapi realitas yang tersembunyi, baik karena ditutupi atau bersifat fenomenal, tentulah tidak mudah untuk diberitakan.

Kriminalitas merupakan realitas yang paling telanjang, karena manusia yang terlibat tidak bisa mengelak jika harus dijadikan informasi. Berbeda dengan penyimpangan sosial yang tidak fisik, atau realitas yang memang harus ditutupi. Menghadapi realitas semacam ini, kemampuan mendapatkan realitas saja, tidak cukup. Berbagai realitas yang tersembunyi harus dinilai dalam konteks keamanan perusahaan surat kabar. Wartawan perlu mengetahui sejauh mana kekuasaan negara berada dalam suatu realitas penyimpangan sosial, atau faktor-faktor kekuasaan yang menyebabkan realitas harus ditutupi. Karenanya sepanjang menyentuh kalangan bawah, biasanya lebih mudah menjadi informasi. Padahal di kalangan ini realitas yang lebih banyak hanyalah tindakan destruktif bersifat fisik. Sementara fenomena berkonteks politik dan ekonomi biasanya berlangsung di kalangan menengah ke atas, dan sangat besar kemungkinan bersinggungan dengan kekuasaan negara.

Kalau harus digunakan sebutan "keberanian", sebenarnya pers belum menjalankan teknik jurnalistik untuk menginvestigasi realitas tertutup. Kelihatannya adalah dengan memanfaatkan "keberanian" narasumber untuk berpendapat tentang realitas sosial tertentu. Perbedaan satu surat kabar dengan surat kabar lain, hanya dalam memilih narasumber. Jika kita sudah terbiasa dengan surat kabar yang menjadikan pendapat

pejabat negara sebagai berita utama, maka belakangan kita menemukan koran yang tidak segan-segan menjadikan pendapat yang bertentangan dengan pendapat pejabat negara sebagai berita utamanya.

Dengan demikian sebenarnya bukan keterbukaan sosial yang sedang dinikmati oleh pers, tetapi peluang yang digunakan oleh sementara elit untuk mengeluarkan pendapat pribadi tentang berbagai masalah berkonteks politik atau ekonomi. Pendapat-pendapat ini bukan sebagai dasar bagi pers untuk merekonstruksi realitas sosial. Akibatnya kita hanya menemukan surat kabar pendapat (*viewspaper*).

Fakta memang harus direkonstruksikan dari keterangan-keterangan narasumber. Tetapi keberadaan narasumber dilihat dari nilainya dalam fakta sosial. Dengan kata lain narasumber diperlukan untuk mendapatkan fakta sosial. Sedangkan komentar atau pendapat narasumber tentang suatu fakta dimaksudkan untuk membantu memperjelas fakta, bukan sebaliknya pendapat narasumber lebih penting ketimbang fakta sosial.

Disiplin jurnalisme untuk memproses fakta bertujuan agar konteks suatu fakta hanyalah kebenaran. Upaya untuk menjaga agar jurnalis tidak tergelincir sehingga merekayasa suatu informasi biasanya terjadi karena konteks suatu fakta bukan kebenaran, tetapi kepentingan pragmatis, baik kepentingan subyektif jurnalis sendiri, maupun pihak lain. Dengan demikian untuk mendapatkan fakta yang murni, pada dasarnya seorang jurnalis harus membersihkan setiap kemungkinan kepentingan subyektif yang dapat menjadi konteks fakta tersebut. Kepentingan ini dapat bersifat internal, yaitu bersumber dari person yang terlibat langsung di dalam fakta, atau bersifat eksternal karena berasal dari pihak lain yang tidak terlibat secara langsung. Sensitivitas jurnalis untuk mendeteksi kepentingan ini diperlukan sebagai dasar dalam menghadapi fakta sosial.

Berlanjut ke: 2. MEMBANGUN PARADIGMA BAGI KEBEBASAN PERS